

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun sebelumnya Pemerintah Indonesia masih berjuang untuk membangkitkan masyarakat Indonesia dari kebutaan aksara. Namun, saat ini masyarakat yang buta aksara kian menipis dimana bukan lagi perang yang dilakukan dalam memberantas buta aksara yang dilakukan untuk saat ini, tetapi perang untuk membuat bangsa ini menjadi cerdas dan berdaya. Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan sayangnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam mengembangkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Kegiatan pembudayaan literasi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pembukaan dari UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Literasi menjadi faktor pembentuk yang sangat penting dalam rangka membentuk pondasi yang kokoh dalam mewujudkan Masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.

Di tengah arus informasi yang terus bertambah melalui berbagai media, kemampuan memahami informasi dengan baik menjadi kunci untuk mengakses, menilai, dan menggunakan informasi dengan bijak. Masyarakat tidak lagi menjadikan buku sebagai satu-satunya media untuk memperoleh informasi. Meski masyarakat perlahan-lahan beralih menggunakan teknologi, tidak semua masyarakat yang mampu menyaring informasi yang telah dibaca maupun mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas. Perpustakaan semakin ditinggalkan

masyarakat karena masyarakat menganggap perpustakaan berisikan informasi yang sudah kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman¹. Perbaikan citra perpustakaan sebagai institusi yang profesional dalam memberikan layanan informasi bagi para pemustaka akan membuka cakrawala berpikir masyarakat, bahkan saat ini perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana alternatif rekreatif ataupun pembelajaran mandiri.

Berdasarkan Hasil survey oleh *Central Connecticut State University* menempatkan Indonesia dalam posisi cukup memprihatinkan, yaitu urutan ke-60 dari 61 negara. Tidak bedanya dengan tahun 2016, Survey yang dilakukan oleh *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah². Kemudian Perpustakaan Nasional melakukan survei tentang tingkat kegemaran membaca di Indonesia terhadap 11.158 responden yang tersebar di 102 kabupaten/kota. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia tahun 2022 sebesar 63,90 (tinggi) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 59,52 (sedang), tahun 2020 sebesar 55,74 (sedang)³. Upaya meningkatkan literasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

¹ Liliek Soedjati. 2015. Pengguna Perpustakaan Di Era Digital Dalam Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Metafora* Vol.2, No.1 Hlm. 41

² Redaksi-bba. 22 Februari 2020. "Sekilas Gerakan Literasi Nasional (GLN): Tugas Masih Berat, Balai Bahasa Aceh. <https://bbaceh.kemdikbud.go.id/2020/02/22/sekilas-gerakan-literasi-nasional-gln-tugas-masih-berat/>. Diakses Pada 22 September 2023

³ Orang Indonesia Makin Gemar Baca. <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-gemar-baca>. Diakses Pada 11 Januari 2024

Misi Pembangunan manusia yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu salah satu pelaksanaannya melalui pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental, pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas⁴. Pemerintah telah berinisiatif untuk mendorong peningkatan literasi di berbagai lapisan masyarakat. Pembangunan karakter bangsa menjadi fokus penting dalam RPJMN ini mengingat peran karakter dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, integritas, dan berdaya saing. Sehingga pembangunan karakter bangsa menjadi komponen strategis dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Budaya literasi adalah bagian dari pembangunan kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia⁵.

Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan, menjadikannya negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua setelah India⁶. Meskipun demikian, tantangan besar masih harus dihadapi, yaitu peningkatan mutu perpustakaan. Saat ini, hanya 11.484 perpustakaan (6,9%) yang memenuhi standar nasional⁷. Selain itu, pemerataan pembangunan literasi di seluruh wilayah Indonesia masih belum

⁴ Kemenko PMK. 11 Agustus 2023. "Pemerintah Dorong Capaian Budaya Literasi Masyarakat Indonesia," Kemenko PMK. <https://kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-dorong-capaian-budaya-literasi-masyarakat-indonesia>. Diakses Pada 2 Desember 2023

⁵ Muhammad Sulton; Nur Fajriana. "Pembangunan Kebudayaan Di Indonesia: Apakah Sejalan Dengan Pembangunan Manusia?", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume 49 No. 1, 2023

⁶ Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. 2020.

⁷ Adin Bondar. 27 Mei 2022. "Indikator Pemerintah Urusan Perpustakaan", Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/adinbondar.kompasiana.com/629094f0ce96e54f49464f92/indikator-urusan-pemerintah-bidang-perpustakaan>. Diakses Pada 8 Maret 2024

tercapai. Ketimpangan ini menuntut upaya afirmasi dan akselerasi dalam peningkatan mutu perpustakaan serta pemerataan akses literasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya penguatan literasi didukung oleh Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan salah satunya yaitu Tingkat Gemar Membaca dan Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Sehingga setiap pemerintah daerah seperti yang ditulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2020 berkewajiban menyerahkan hasil pengukuran IKK urusan pemerintahan, termasuk di bidang perpustakaan⁸. Perpustakaan Republik Indonesia sebagai Lembaga non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden menjadikan sasaran strategis “mewujudkan Pembangunan literasi dan kegemaran membaca” dalam renstra Perpustakaan RI periode tahun 2020-2024.

Karakteristik pengukuran Tingkat Gemar Membaca (TGM) lebih memfokuskan literasi Masyarakat dari sisi hilir, yakni pengembangan budaya membaca, kegemaran membaca, dan literasi masyarakat.⁹ Sementara, Pengukuran IPLM bertujuan untuk mengetahui kondisi setiap unsur Pembangunan literasi masyarakat yang meliputi pemerataan-pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan,

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

⁹ Perpustakaan RI. 2021. *Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*. Jakarta: Perpustakaan Press. Hlm. 26

dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Sehingga, karakteristik penilaian IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pada penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Dengan penguatan perpustakaan dari sisi kelembagaan dan infrastruktur ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang perpustakaan.

Pada era disrupsi 4.0 ini perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan koleksi tetapi juga sebagai sarana untuk menyimpan karya, pusat informasi, rekreasi, pendidikan dan kultural dimana semua pengelolaan dan pelayanan di perpustakaan harus berevolusi kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan kondisi tersebut Perpustakaan Nasional RI telah melakukan sensus dan mendapati adanya capaian dari pertumbuhan data perpustakaan tahun 2022-2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Pertumbuhan data Perpustakaan Tahun 2022-2023

No	Provinsi	Jumlah Perpus 2022	Jumlah Perpus 2023	Pertumbuhan Jumlah
1.	Sumatera Barat	4.115	5.013	21.82%
2.	Jawa Tengah	22.109	26.040	17.78%
3.	Riau	2.952	3.443	16.63%
4.	Jambi	2.569	2.947	14.71%
5.	Kalimantan Selatan	4.066	4.632	13.92%
6.	Jawa Barat	21.566	24.523	13.71%
7.	Sulawesi Tenggara	3.064	3.468	11.42%
8.	Kalimantan Utara	398	447	12.31%
9.	Nusa Tenggara Barat	2.916	3.270	12.14%
10.	Sulawesi Selatan	7.384	8.248	11.17%
11.	Gorontalo	1.120	1.249	11.52%
12.	Papua	661	732	11.04%
13.	Maluku	1.527	1.690	11.07%
14.	Sulawesi Tengah	2.916	3.159	10.77%
15.	Kalimantan Barat	4.779	5.265	11.02%

No	Provinsi	Jumlah Perpus 2022	Jumlah Perpus 2023	Pertumbuhan Jumlah
16.	Lampung	4.848	5.305	9.43%
17.	Sumatera Selatan	5.486	5.996	9.30%
18.	Bengkulu	2.359	2.577	9.24%
19.	Aceh	4.282	4.652	8.64%
20.	Kalimantan Timur	2.635	2.852	8.24%
21.	Sulawesi Barat	973	1.052	8.12%
22.	Kalimantan Tengah	2.041	2.198	7.69%
23.	NTT	4.885	5.259	7.66%
24.	Jawa Timur	17.274	18.554	7.41%
25.	Bangka Belitung	1.409	1.510	7.17%
26.	DI Yogyakarta	2.881	3.073	6.66%
27.	Maluku Utara	1.137	1.212	6.60%
28.	Banten	3.626	3.860	6.45%
29.	Sumatera Utara	7.907	8.408	6.34%
30.	Kepulauan Riau	1.664	1.768	6.25%
31.	DKI Jakarta	3.619	3.189	5.53%
32.	Sulawesi Utara	2.000	2.088	4.40%
33.	Papua Barat	931	965	3.65%
34.	Bali	2.880	2.985	3.65%
	Total	154.920	172.259	11.19%

Sumber: data perpunas, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa persentase pertumbuhan data pendataan perpustakaan wilayah Sumatera Barat menjadi urutan pertama di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan literasi meskipun jumlah perpustakaan di Sumatera Barat masih belum sebanyak perpustakaan di Pulau Jawa. Peningkatan pembangunan literasi ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas perpustakaan, menggalakkan budaya literasi, serta meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan sehingga nantinya dapat mendorong literasi masyarakat.

Program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk menjadikan pustaka sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumbar sehingga dapat bersaing di kompetisi global. Keseriusan dari program ini dilihat dari Tingkat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) naik secara signifikan dari awalnya 14,17 pada 2021 menjadi 67,33 pada tahun 2022 sehingga menghantarkan Sumatera Barat ke peringkat 14 nasional¹⁰. Meskipun demikian, Pembangunan literasi di Sumatera Barat masih belum merata di setiap wilayah.

Berdasarkan kajian indeks Pembangunan literasi masyarakat yang telah disusun oleh pihak Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2018, terdapat 2 aspek utama yang terlibat dalam penilaian IPLM. Aspek tersebut terdiri atas aspek masyarakat yang diperoleh dari data BPS berdasarkan jumlah penduduk wilayah dan aspek unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari 7 unsur. Setiap unsur tersebut didasarkan atas standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan RI. Perhitungan setiap nilai dari IPLM dilakukan dengan proses standarisasi untuk mengevaluasi pencapaian nilai IPLM terhadap standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu sebagai berikut.

¹⁰ Miko Elfisha. 9 Januari 2023. "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumbar 2022 naik 475 persen", Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3341991/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-sumbar-2022-naik-475-persen>. Diakses Pada 20 September 2023

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1)

Dinilai dari ketersediaan unit perpustakaan umum, sekolah, Perguruan Tinggi, khusus. Gedung, Infrastruktur IT, Anggaran dan regulasi daerah dalam menunjang Pembangunan literasi. Standar yang digunakan pada kajian IPLM 2023 untuk UPLM 1 ini adalah jumlah perpustakaan yang tersedia sama dengan jumlah kelembagaan yang ada di daerah tersebut.

2. Ketercukupan koleksi (UPLM2)

Dilihat dari ketercukupan koleksi perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, khusus, baik cetak maupun digital. standar untuk UPLM2 ini adalah jumlah koleksi dalam satuan judul dibandingkan dengan 2 kali jumlah populasi penduduk.

3. Ketercukupan tenaga kerja (UPLM3)

Tenaga perpustakaan baik teknis maupun pustakawan : perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, khusus. Jumlah SDM, Kualifikasi SDM, jumlah pustakawan, jumlah pustakawan yang bersertifikasi, jumlah tenaga yang bersertifikasi Diklat, Jumlah SDM yang bersertifikasi Pustakawan. Standar yang digunakan dalam UPLM 3 ini adalah rasio jumlah tenaga perpustakaan dengan populasi penduduk sebesar 1:2.500

4. Tingkat kunjungan Masyarakat per hari (UPLM4)

Dilihat dari tingkat kunjungan masyarakat secara onsite maupun online. Apakah hanya daftar pengunjung di inisilite atau pengunjung perpustakaan digital. Jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), Jam layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan

perbulan/tahun. Standar untuk kajian IPLM tahun 2023 untuk UPLM 4 yaitu persentase jumlah kunjungan masyarakat per hari sebesar 2% dari populasi penduduk.

5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (UPLM5)

Dilihat dari jumlah unit perpustakaan yang telah dibina sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), dan memiliki nomor pokok perpustakaan (NPP). Standar pada UPLM 5 ini adalah jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan SNP sebesar 22,35% dari keseluruhan jumlah perpustakaan yang tersedia.

6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi (UPLM6)

Dilihat dari rasio jumlah partisipasi Masyarakat dalam promosi atau sosialisasi, baik onsite maupun online. Standar yang ditetapkan Perpustnas untuk masyarakat yang terlibat yaitu sebanyak 2% dari jumlah penduduk.

7. Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7)

Dilihat dari akumulasi anggota perpustakaan umum (Kab/Kota), maupun kelurahan dan kecamatan), Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Standar yang ditetapkan untuk UPLM 7 ini adalah jumlah anggota perpustakaan sebesar 2% dari jumlah populasi penduduk.

Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, peningkatan indeks pembangunan literasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak di Kota Padang. Sehubungan dengan Visi WaliKota Padang yang tertera di RPJMD yaitu

“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul berdaya saing”. Perpustakaan merupakan bagian dari pendidikan yang akan menunjang Kota Padang sebagai Kota Pendidikan. Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Sumatera Barat sebanyak 5,75 juta jiwa pada akhir tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

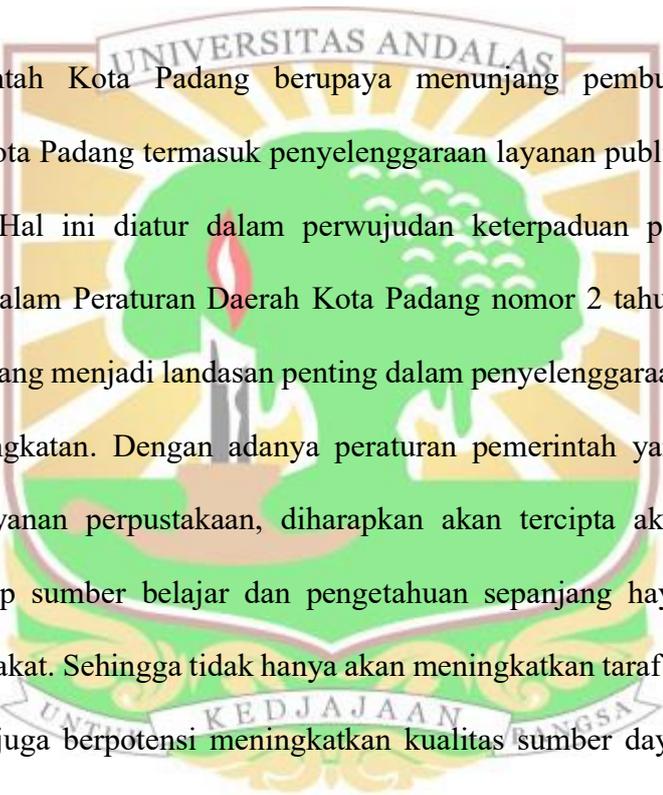

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Nama Data	Nilai
1	Kota Padang	934.847
2	Kab. Agam	530.123
3	Kab. Pesisir Selatan	528.381
4	Kab. Padang Pariaman	455.218
5	Kab. Pasaman Barat	445.439
6	Kab. Solok	408.424
7	Kab. Lima Puluh Kota	397.683
8	Kab. Tanah Datar	380.727
9	Kab. Pasaman	309.202
10	Kab. Sawahlunto/sijunjung	244.342
11	Kab. Dharmasraya	237.724
12	Kab. Solok Selatan	182.573
13	Kota Payakumbuh	146.772
14	Kota Bukit Tinggi	138.534
15	Kota Pariaman	101.680
16	Kab. Kepulauan Mentawai	95.068
17	Kota Solok	82.478
18	Kota Sawahlunto	68.380
19	Kota Padang Panjang	62.731

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.2, Pada tahun 2023 Kota Padang menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak di Sumatera Barat, yakni 934,85 ribu jiwa (16,26%) dari total penduduk. Artinya, Kota Padang memiliki mayoritas penduduk di Sumatera Barat. Jumlah penduduk Kota Padang yang banyak dan masyarakat membutuhkan

pendidikan semakin banyak, permintaan akan akses ke fasilitas pendidikan seperti perpustakaan akan meningkat. Perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan literasi yang penting untuk pengembangan masyarakat. Aspek masyarakat inilah yang menjadi salah satu aspek utama dalam Pembangunan literasi masyarakat¹¹.



Pemerintah Kota Padang berupaya menunjang pembudayaan gemar membaca di Kota Padang termasuk penyelenggaraan layanan publik untuk bidang perpustakaan. Hal ini diatur dalam perwujudan keterpaduan penyelenggaraan perpustakaan dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2018 tentang Perpustakaan yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan perpustakaan di berbagai tingkatan. Dengan adanya peraturan pemerintah yang memastikan pemerataan layanan perpustakaan, diharapkan akan tercipta akses yang lebih merata terhadap sumber belajar dan pengetahuan sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga tidak hanya akan meningkatkan taraf pendidikan dan literasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional secara keseluruhan di Kota Padang.

Namun, data menunjukkan bahwa pencapaian literasi masyarakat, sebagaimana tercermin dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), masih menghadapi tantangan signifikan. Selama tiga tahun terakhir, terjadi

¹¹ Perpunas RI. 2020. Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Jakarta:Perpunas Press. hlm. 5

ketidakkonsistenan nilai dan peringkat IPLM Kota Padang di tingkat provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.3
Perbandingan IPLM Per Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023

Peringkat	Kab/Kota	IPLM 2022	peringkat	Kab/Kota	IPLM 2023
1	Kota Bukittinggi	99,01	1	Kota Solok	89,61
2	Kota Pariaman	93,38	2	Kota Sawahlunto	88,33
3	Kota Padang Panjang	88,83	3	Kota Padang Panjang	88,22
4	Kab. Pasaman	80,41	4	Kab. Lima Puluh Kota	85,47
5	Kab. Pesisir Selatan	78,85	5	Kab. Sijunjung	83,96
6	Kota Padang	77,94	6	Kab. Pesisir Selatan	81,60
7	Kota Solok	76,99	7	Kota payakumbuh	77,43
8	Kota Payakumbuh	74,28	8	Kota bukittinggi	74,96
9	Kab. Dharmasraya	70,97	9	Kota Padang	72,49
10	Kota Sawahlunto	68,06	10	Kota pariaman	70,99
11	Kab. Agam	67,25	11	Kab. Pasaman	62,79
12	Kep. Mentawai	66,23	12	Kab. Tanah Datar	59,27
13	Kab. Sijunjung	63,60	13	Kab. Pasaman Barat	58,00
14	Kab. Tanah Datar	58,06	14	Kab. Solok Selatan	52,91
15	Kab. Padang Pariaman	57,06	15	Kab. Dharmasraya	52,50
16	Kab. Lima Puluh Kota	56,63	16	Kab. Agam	47,98
17	Kab. Solok Selatan	50,73	17	Kab. Padang Pariaman	46,80
18	Kab. Pasaman Barat	49,91	18	Kab. Solok	46,27
Sumatera Barat		69,37	Sumatera Barat		77,31

Sumber: Laporan Hasil Kajian IPLM, 2024

Dalam rekapitulasi Indeks Pembangunan Literasi Kota Padang selama 3 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terjadi penurunan peringkat. Kota Padang sendiri pada tahun pada tahun 2021 memiliki Tingkat Indeks Pembangunan Literasi yang rendah. Namun pada tahun 2022 Tingkat IPLM Kota Padang berhasil naik ketingkat sedang. Sementara, pada tahun 2023 IPLM Kota Padang kembali menjadi 72,49 poin. Keadaan ini menunjukkan penurunan posisi Kota Padang sebanyak 5,45 poin.

Tabel 1.4
Peringkat IPLM Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai IPLM	Peringkat
2021	37,45	2
2022	77,94	6
2023	72,49	9

Sumber : data olahan peneliti, tahun 2023

Dari tabel perbandingan IPLM di Kota Padang, terlihat bahwa terjadi penurunan peringkat IPLM Kota Padang se-tingkat provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Penurunan peringkat ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Padang dalam upaya Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Padang. Literasi Masyarakat di Kota Padang menjadi upaya menunjang peningkatan kualitas SDM di Kota Padang selaras dengan salah satu dari tiga isu strategis. Pembangunan Kota Padang “Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif”. Dengan pemerataan literasi pada seluruh aspek masyarakat diharapkan dapat menunjang pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang.

Berdasarkan penurunan nilai dan peringkat di Kota Padang tersebut, setiap unsur pada IPLM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Gambar 1.1
Rumus Penghitungan IPLM

$$UPLM_i = \frac{\left(\frac{\text{KabKota} + \text{Kec} + \text{Desa/Kel} + \text{SD/MI} + \text{SMP/Mts} + \text{SMA/MA} + \text{Perguruan Tinggi} + \text{Khusus}}{AM_i} \right)}{k_i}$$

Keterangan:

UPLM_i : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

AM_i : Aspek Masyarakat Kab/Kota sesuai dengan UPLM yang dihitung

k_i : Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung

Sumber: Hasil kajian IPLM Perpunas 2023

Berdasarkan gambar 1.1 rumus penghitungan IPLM pada setiap unsurnya merupakan hasil perbandingan jumlah unsur dari setiap jenis perpustakaan dari mulai perpustakaan umum kab/kota, Perpustakaan Desa/Kel, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Perguruan tinggi, dan Perpustakaan Khusus dibagi dengan Aspek masyarakat yang disesuaikan berdasarkan Unsur yang dihitung. Kemudian, hasil dari pembagian tersebut dibandingkan dengan standarisasi yang telah ditetapkan pada masing-masing unsur IPLM. Rincian poin masing-masing unsur di Kota Padang menurut data yang dikeluarkan oleh Perpunas pada tahun 2023 disajikan dalam tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.5
Rincian IPLM Kota Padang Per Masing Unsur Tahun 2023

UPLM	Nilai	Interpretasi
UPLM 1	0,7793	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 77 persen dari standar
UPLM 2	0,6581	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 65 persen dari standar
UPLM 3	1	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar

UPLM 4	0,4841	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 48 persen dari standar
UPLM 5	0,4479	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebesar 44 persen dari standar
UPLM 6	0,7047	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 70 persen dari standar
UPLM 7	1	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar

Sumber: Laporan akhir kajian IPLM, 2023

Dari tabel 1.5 tersebut, terlihat bahwa dari ketujuh unsur yang membangun Indeks Pembangunan Layanan Perpustakaan Masyarakat (IPLM), ada dua unsur yang memiliki angka paling rendah, yaitu Unsur keempat yang mencakup tingkat kunjungan masyarakat per hari hanya mencapai sebesar 48 persen dari standar, dan unsur kelima yang menunjukkan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebesar 44 persen dari standar¹². Ini mengindikasikan bahwa jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan SNP dan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan di Kota Padang tahun 2023 belum memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam pengukuran IPLM tahun 2023.

Kunjungan masyarakat pada perpustakaan yang ada di Kota Padang untuk Kajian IPLM 2023 masih rendah dimana belum mencapai standar minimum yang ditetapkan. Ketercukupan unsur pada IPLM tahun 2023 sudah terpenuhi sesuai standar apabila nilainya sudah mencapai angka 1. Hal tersebut dijelaskan oleh Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang pada kutipan wawancara berikut.

¹² Perpunas RI. 2023. Laporan Hasil Kajian IPLM Tahun Anggaran 2023

“Ada perubahan aturan untuk ukuran nilai IPLM tahun 2023 itu, jadi dibatasi maksimal nilainya itu dengan poin 1, jika sudah memenuhi angka satu berarti sudah memenuhi standar sesuai dengan masing-masing unsurnya. Tingkat kunjungan untuk IPLM 2023 itu sudah naik dari tahun sebelumnya, meski angka ini masih belum mencapai standar dari Perpustnas. Seperti pada Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan belum ada data kunjungannya karna disana masih berupa pojok baca dan bukunya pun belum mencukupi untuk dapat dikatakan perpustakaan. Kendalanya disana karna tidak ada petugas yang fokus untuk mengurus perpustakaan itu dan regulasi khusus belum ada untuk mendukung pengembangan perpustakaan di tingkat itu waktu itu jadi ya belum terlalu *aware* lah di sana dengan pentingnya perpustakaan, baru adanya sekarang berupa Surat Edaran Walikota untuk mewajibkan Kecamatan dan Kelurahan itu punya perpustakaan masing-masing. Kemudian Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi itu masih kurang didata jadi ya belum maksimal.” (Wawancara dengan Rahma Fitriani, S.Sos, M.Si, Selaku Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan Dispusip Kota Padang, Pada 18 Desember 2024, Pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat perubahan cara mengukur IPLM pada tahun 2023 sehingga ada batas maksimal untuk setiap unsurnya. Tingkat Kunjungan masyarakat Kota Padang ke perpustakaan pada tahun 2023 sudah naik dari tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai standar minimal yang ditetapkan oleh Perpustnas. Masih terdapat lembaga yang tidak ada perpustakaan sama sekali seperti Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga tidak ada data kunjungan masyarakat. Hal ini menjadi kendala karna keberadaan perpustakaan masih belum dilihat sebagai aspek yang penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lembaga. Disamping itu, masih kurangnya data yang didapatkan dari Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi. Berikut data kunjungan masyarakat pada masing-masing jenis perpustakaan di Kota Padang berdasarkan Kajian IPLM 2023.

Tabel 1.6
Data Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Kota Padang Berdasarkan Kajian IPLM Tahun 2023

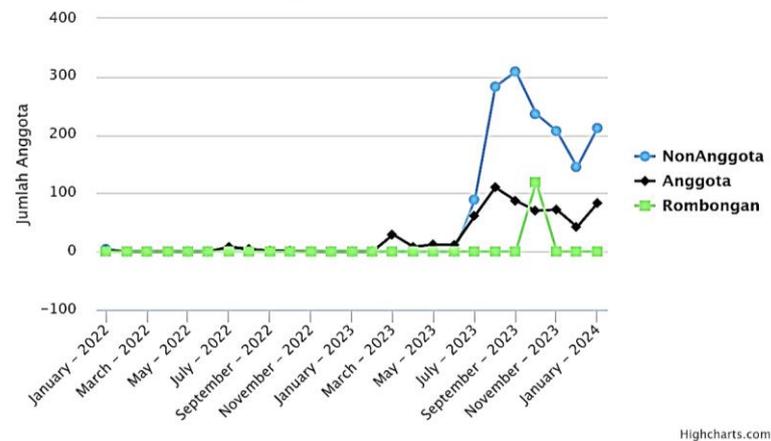
No.	Jenis Perpustakaan	Tahun 2023
1.	Kabupaten/Kota	20.375
2.	Kecamatan	0
3.	Desa/Kelurahan	0
4.	SD/MI	193.211
5.	SMP/MTs	95.963
6.	SMA/K/MA	40.992
7.	Perguruan Tinggi	1.669.540
8.	Perpustakaan Khusus	121.588
Jumlah		2.061.669

Sumber: Data Dispusip, 2024

Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui bahwa Perpustakaan Perpustakaan Perguruan Tinggi mendapatkan jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 80,9 persen dari total kunjungan masyarakat Kota Padang pada IPLM 2023, kemudian diikuti oleh lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA) dengan kunjungan sebesar 15,9 persen, Perpustakaan Khusus sebesar 5,9 persen dan Perpustakaan Kabupaten/Kota hanya sebesar 0,99 persen. Sementara itu kunjungan pada Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan tidak mencatatkan kunjungan sama sekali. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan infrastruktur dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan.

Bila ditinjau dari tingkat kunjungan masyarakat pada Perpustakaan Kota Padang sendiri juga tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Kota Padang seperti pada grafik berikut ini.

Gambar 1.2
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Kota Padang
Januari 2022- Januari 2024



Sumber: Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat kunjungan masyarakat di Perpustakaan Umum Kota Padang masih rendah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas di perpustakaan umum Kota Padang sendiri. Sementara itu, keberadaan perpustakaan yang berpindah-pindah lokasi menyebabkan masyarakat kurang mengetahui dimana letak perpustakaan¹³. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam aksesibilitas Perpustakaan Umum Kota Padang.

Disamping rendahnya unsur tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang telah dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan yang mempunyai Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Kota Padang masih rendah, yaitu sekitar 10.03% atau sebanyak 68 perpustakaan. Sehingga

¹³ Dona Ariska. Skripsi: *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pustaka Terhadap Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang*. Padang: Unand, 2023

berdasarkan standar minimum UPLM ke-5 menurut perhitungan Perpustakaan, masih ada kekurangan 88 unit perpustakaan yang mesti ditambah untuk dibina agar memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan¹⁴. Berikut lembaga yang dibina Dispusip Kota Padang dalam penilaian IPLM.

Tabel 1.7

Jumlah Perpustakaan yang dibina Dispusip Kota Padang selama IPLM

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Total
123 unit	68 unit	40 unit	231 unit

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perpustakaan yang telah dibina oleh Dispusip Kota Padang selama adanya IPLM berjumlah 231 unit. Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Bahkan, pada tahun 2023 hanya ada 40 perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Sementara itu, perpustakaan yang telah terakreditasi juga masih sangat minim dari total jumlah keseluruhan perpustakaan yang ada di Kota Padang. Berikut tabel jumlah perpustakaan yang memiliki akreditasi di Kota Padang.

Tabel 1.8

Jumlah Perpustakaan Yang Terakreditasi (SNP) Di Kota Padang

No	Jenis Perpustakaan	Akreditasi			Jumlah Perpustakaan	Jumlah yang terakreditasi
		A	B	C		
1.	Perpustakaan SD/MI	-	3	26	414	29
2.	Perpustakaan SMP/MTS	-	1	13	122	14
3.	Perpustakaan SMA/K/MA	1	2	4	113	7

¹⁴ Perpustakaan RI. 2023. *Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*. Jakarta: Perpustakaan Press

No	Jenis Perpustakaan	Akreditasi			Jumlah Perpustakaan	Jumlah yang terakreditasi
		A	B	C		
4.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	45	6
5.	Perpustakaan Khusus	-	-	1	47	1
6.	Perpustakaan Umum	-	-	1	1	1
Jumlah					742	58

Sumber: Dokumen Dispusip Kota Padang, 2023

Berdasarkan data tabel 1.7, Terlihat bahwa jumlah perpustakaan yang terakreditasi juga masih sedikit. Berdasarkan data, hanya 58 perpustakaan yang sudah terakreditasi, dan dari jumlah tersebut hanya tiga perpustakaan yang meraih akreditasi A, kemudian untuk perpustakaan yang berakreditasi B sebanyak 8 perpustakaan dan sisanya perpustakaan berakreditasi C sebanyak 47 perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan di Kota Padang belum memenuhi standar nasional. Perpustakaan yang memenuhi standar nasional memiliki kelengkapan koleksi yang relevan dan aktual, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memiliki staf yang berkualitas yang mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan pemustaka.

Kelengkapan fasilitas perpustakaan ini terbukti berpengaruh pada tingkat kunjungan masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam penelitian Eka Fitriani dan Hengky. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa fasilitas perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk berkunjung, sementara kualitas pelayanan dan kinerja pustakawan memiliki pengaruh yang lebih kecil. Oleh karena itu, upaya pemerataan perpustakaan di Kota Padang dapat menjadi

langkah penting dalam meningkatkan minat kunjungan masyarakat serta mendukung tercapainya perpustakaan yang berstandar nasional¹⁵.

Dalam memastikan perpustakaan-perpustakaan sesuai dengan standar dan meningkatkan IPLM di Kota Padang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Padang mempunyai peran penting dalam membina perpustakaan-perpustakaan di bawah naungannya melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Dispusip sebagai penyedia layanan perpustakaan untuk menjangkau masyarakat di Kota Padang. Selain itu, Dispusip Kota Padang bertanggung jawab dalam mengumpulkan data kelengkapan perpustakaan dari seluruh perpustakaan yang ada di Kota Padang sehingga dapat diakumulasikan menjadi nilai IPLM Kota Padang¹⁶.

Program pembinaan perpustakaan dilakukan oleh Dispusip Kota Padang yang dilakukan secara bertahap melalui berbagai kegiatan, baik kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat Kota maupun peningkatan literasi masyarakat. Pembinaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan SNP yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina seluruh perpustakaan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerataan akses terhadap layanan perpustakaan. Untuk mengelola berbagai program kegiatan diperlukan sistem manajemen kinerja yang baik. Menurut Armstrong tahun 1994, manajemen kinerja merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

¹⁵ Eka Fitriyani; Hengky Pramusinto, "Pengaruh Fasilitas Perpustakaan, Kualitas Pelayanan, dan Kinerja Pustakawan terhadap Minat Berkunjung Masyarakat," *Economic Education Analysis Journal* 7, no. 2 (2018): 73–84, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>.

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI. 2021. *Pedoman pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Press

melalui kinerja tim ataupun individu dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan standar untuk kepentingan organisasi¹⁷.

Dalam sebuah sistem manajemen kinerja, masukan yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen kinerja. Penerapan manajemen kinerja di Dispusip Kota Padang juga didukung oleh input yang diperlukan untuk menjalankan kinerja dengan efektif. Input (masukan) Dispusip Kota Padang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasana, serta mekanisme kerja. Namun, Dispusip Kota Padang masih menghadapi kendala dalam ketercukupan sumber daya, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan sarana seperti yang disampaikan oleh Pustakawan ahli muda bidang Perpustakaan berikut ini.

“Kita disini juga masih 2 komputer sehingga terbatas juga sarana untuk bekerjanya dan sumber daya disini sebenarnya belum memadai. Seperti dalam penginputan data IPLM ini sebetulnya butuhnya perjenjang tingkat SD satu orang, SMP satu, SMA satu dan Perguruan Tinggi juga satu orang jadi sekitar 4 orang. Kita di bidang pembinaan ada 4 orang, tapi yang dilibatkan hanya 2 orang. Tidak dilibatkan karna kemampuan yang belum memenuhi kriteria. Makanya kita kurang menyerap data.” (Wawancara dengan Rahma Fitriani, S.Sos, M.Si, Selaku Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan Dispusip Kota Padang, Pada tanggal 15 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa salah satu penyebab rendahnya nilai IPLM di Kota Padang karena masih rendahnya penyerapan data. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya pemahaman pegawai dalam

¹⁷ Djoko Prasetyo. 2014. Manajemen Kinerja Pegawai. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul I hlm.4

mengoperasikan komputer sehingga dengan seharusnya penginputan data dapat dikerjakan oleh 4 orang namun karena keterbatasan tadi hanya 2 orang saja yang dapat dilibatkan sehingga mengurangi kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang untuk menyerap data lebih banyak dari perpustakaan yang ada di Kota Padang. Berikut data distribusi sumber daya manusia dan tupoksi masing-masing bidang di Dispusip Kota Padang.

Tabel 1.9
Distribusi dan Tupoksi Sumber Daya Manusia di Dispusip Kota Padang 2023

Bidang	Jumlah Pegawai	Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Sekretariat	12 Orang	Memberikan pelayanan administrasi umum pada satuan organisasi lingkungan dinas dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan.
Pembinaan	8 Orang	Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan, pengembangan SDM, sarana, dan pengawasan kearsipan serta perpustakaan.
Perpustakaan	15 Orang	Membantu Kepala Dinas dalam kebijakan promosi, layanan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
Arsip	8 Orang	Membantu Kepala Dinas, menyusun program kerja, mengelola arsip, dan melaksanakan pengendalian serta pelaporan.

Sumber: PPID Kota Padang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.8, dapat dilihat bahwa setiap bidang di Dispusip Kota Padang memiliki peran spesifik dalam mendukung tugas dan fungsi dinas, dengan fokus utama pada pengelolaan administrasi, pengembangan SDM, serta penyelenggaraan layanan perpustakaan dan arsip. Bidang Pembinaan memiliki tugas khusus dalam pengembangan kapasitas perpustakaan, yang mencakup upaya peningkatan Indeks Perpustakaan Lembaga Masyarakat (IPLM). Bidang Pembinaan terdiri dari 8 orang, yang terbagi menjadi dua fokus, yaitu pembinaan

arsip dan pembinaan perpustakaan. Dengan demikian, hanya 4 orang yang fokus pada pembinaan perpustakaan. Sementara itu, pada bidang perpustakaan, fokus utamanya adalah memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yang nantinya juga berperan dalam meningkatkan IPLM.

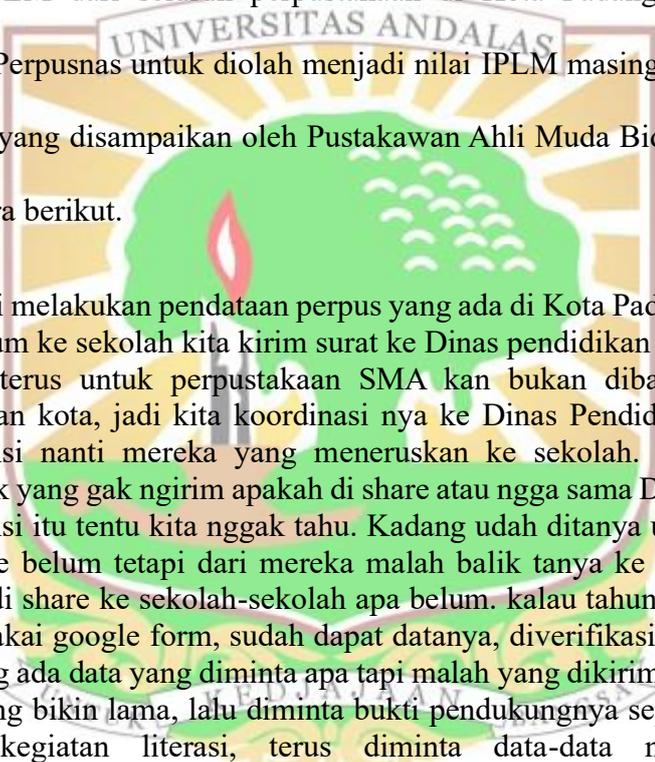
Disamping keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, Dispusip Kota Padang juga masih menghadapi kendala anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan pada wawancara berikut ini.

“Perpustakaan yang sudah memenuhi standar di Kota Padang ini masih rendah, untuk itu kita ada program pembinaan perpustakaan, tapi untuk mendukung itu anggaran kita masih terbatas. Pembinaan ke lapangan untuk perpustakaan itu masih terbatas 40 sekolah, makanya kualitas layanan belum merata. (Wawancara dengan Rahma Fitriani, S.Sos, M.Si., Selaku Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan Dispusip Kota Padang, Pada 21 November 2023, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, keterbatasan anggaran yang dialami mengakibatkan terbatas juga kegiatan pembinaan perpustakaan yang dapat dilakukan oleh Dispusip Kota Padang. Pada tahun 2023, Dispusip Kota Padang melakukan pembinaan ke 40 sekolah di Kota Padang. Dengan jumlah perpustakaan yang ada di Kota Padang yang banyak dengan pembinaan yang dilakukan tentunya ini masih terbatas. sehingga layanan pembinaan belum bisa menjangkau lebih banyak perpustakaan dalam setahunnya.

Pada tahap proses kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang melakukan pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan pembangunan literasi, mulai dari pembinaan perpustakaan seluruh sekolah yang ada di Kota Padang untuk

memberikan pemahaman kepada pihak pengelola perpustakaan sekolah dalam mengelola perpustakaan sesuai dengan standar nasional, kemudian kegiatan literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh arparatur bidang pembinaan dan bidang perpustakaan di Dispusip Kota Padang. Selain melakukan kegiatan dalam meningkatkan pembangunan literasi, Dispusip Kota Padang juga melakukan kegiatan tambahan dalam mendata dan menginput data tujuh unsur IPLM dari seluruh perpustakaan di Kota Padang yang nantinya dikirimkan ke Perpunas untuk diolah menjadi nilai IPLM masing-masing daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan pada wawancara berikut.



“Kami melakukan pendataan perpus yang ada di Kota Padang, Sebelum ke sekolah kita kirim surat ke Dinas pendidikan kota dulu, terus untuk perpustakaan SMA kan bukan dibawah naungan kota, jadi kita koordinasinya ke Dinas Pendidikan Provinsi nanti mereka yang meneruskan ke sekolah. Tapi banyak yang gak ngirim apakah di share atau ngga sama Dinas Provinsi itu tentu kita nggak tahu. Kadang udah ditanya udah dishare belum tetapi dari mereka malah balik tanya ke kita, udah di share ke sekolah-sekolah apa belum. kalau tahun lalu kita pakai google form, sudah dapat datanya, diverifikasi lagi kadang ada data yang diminta apa tapi malah yang dikirim apa itu yang bikin lama, lalu diminta bukti pendukungnya seperti foto kegiatan literasi, terus diminta data-data nama pustakawan dan teknisinya serta pengujungnya.”
(Wawancara dengan Rahma Fitriani, S.Sos, M.Si., Selaku Pustakawan Ahli Muda Bidang Pembinaan Dispusip Kota Padang, Pada tanggal 4 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa Dispusip Kota Padang mengalami kesulitan dalam memperoleh data dari sekolah-sekolah, masih banyak yang tidak mengirimkan data. Hal ini diindikasikan kesadaran pihak sekolah atau lembaga lain dalam memberikan data yang akurat dan sesuai masih rendah.

Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman akan manfaat literasi, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam mendukung upaya pembangunan literasi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya jumlah data IPLM Kota Padang yang dapat terserap. Untuk menilai sejauh mana realisasi kinerja Dispusip Kota Padang dalam mendukung pencapaian IPLM dan pembangunan literasi masyarakat, berikut disajikan tabel yang memuat data target, realisasi, dan capaian kinerja Dispusip pada tahun 2021–2023.

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.10

Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Perpustakaan Pada Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perpustakaan yang dikelola dengan baik	35%	53%	151%	44%	44%	100%	-	-	-
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	-	-	-	-	76%	72,49%	95%

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sumber : LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang menunjukkan hasil yang bervariasi. Persentase perpustakaan yang dikelola dengan baik mencapai hasil sangat baik pada tahun 2021 dengan capaian 151% dari target, namun stagnan pada tahun 2022 dengan

capaian 100%. Pada tahun 2023, fokus kinerja bergeser ke Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang berhasil mencapai 95% dari target. Target kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun realisasinya masih berada di bawah target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini mencerminkan adanya upaya nyata dalam pembangunan literasi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan pada masukan yang diperlukan untuk mendukung kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Selain itu, juga terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahapan proses kinerja sehingga indikator kinerja untuk IPLM belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait Manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa tambahan referensi bagi kajian ilmu administrasi publik terkait Manajemen kinerja organisasi pemerintahan.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pertimbangan untuk peningkatan kinerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang.

